

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pancasila sudah bukan sekedar pedoman untuk bernegara saja namun jauh diatas itu Pancasila memiliki pengaruh besar dalam menjadi dasar kehidupan berbangsa juga bernegara. Berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa sudah seharusnya menjunjung tinggi setiap nilai Pancasila itu sendiri, tanpa terkecuali warga negara itu sendiri.

Sewaktu ditetapkannya dasar negara yaitu Pancasila merupakan awal mula Bangsa Indonesia di masa lalu, kini hingga nanti. Pancasila memiliki pondasi yang kuat hingga menjadi pondasi dasar dalam memersatukan masyarakat multikultural. Setiap nilai Pancasila seakan menjadi lilin yang menyinari Indonesia menuju arah yang lebih indah. Sudah menjadi tanggung jawab bagi bangsa Indonesia dengan diakuinya Pancasila sebagai ideologi bangsa sejatinya wajib untuk mengamalkan kelima nilai sila Pancasila dalam menjalankan pemerintahan.

Segenap jiwa warga negara Indonesia semestinya sudah tertanam nilai-nilai Pancasila pada masing-masing jati dirinya. Nilai Ketuhanan seagai awal dilanjut dengan nilai Kemanusiaan lalu dikukuhkan dengan nilai persatuan diteruskan dengan nilai kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang berarti keputusan didorong dengan musyawarah mufakat dan ditutup dengan nilai keadilan merupakan bentuk utuh Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Nilai tersebut menjadi kebiasaan yang baik dan adat istiadat yang berkembang dan dipertahankan dalam susunan masyarakat Indonesia yang sejatinya dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup bagi rakyat Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dimaknai sebagai landasan demokrasi Indonesia selain itu juga dimaknai sebagai keutamaan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah dalam membentuk sebuah keputusan lalu berlangsungnya musyawarah perlu diselimuti suasana kekeluargaan. Nilai sila keempat Pancasila memiliki makna untuk memperlakukan antar sesama warga negara untuk saling terlibat dalam mengambil keputusan sehingga keputusan menjadi menjadi berguna dan bermanfaat bagi seluruh kalangan. Berkaitan dengan nilai demokrasi, "*Democracy is all about people because of supreme power was in the hands of the people*", yang berarti bahwa pemerintahan berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Pada kesempatan yang lain, Abraham Lincoln (dalam Gandamana, 2017, hlm. 2) juga mengatakan:

“The entire contents of the country belongs to the people. Whenever they shall grow weary of the existing government, they can revolutionary right to dismember or overthrow it”.

Dari pernyataan Abraham Lincoln nilai demokrasi merupakan suatu kekuasaan yang pemilik tertingginya ialah rakyat yang dimana segala tindak sebab akibat perilaku rakyat akan Kembali pada rakyat itu sendiri. Sri Wuryan dan Saefullah (dalam Gandamana, 2017, hlm. 3) mengatakan

“Democracy is closely related to human rights which includes freedom of expression, freedom of belief and freedom of action. With democracy chaos will be avoid and democracy recognizes such values as responsibility and democracy will create a sense of love, care and respect”.

Dari pendapat yang telah dipaparkan, dapat dinyatakan bahwa demokrasi sejalan lurus dengan hak asasi manusia atau bisa disebut juga kemanusiaan, karena didalam demokrasi terdapat kebebasan berekpresi, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan berperilaku. Dengan adanya demokrasi maka kekacauan dapat dihindari selain demokrasi akan menimbulkan rasa cinta, kepedulian hingga tanggung jawab.

Dalam hal terkait Idrus Affandi (1996, hlm. 27) menyampaikan bahwa demokrasi bagian penting dari sebuah pendidikan politik karena demokrasi merupakan metode keterlibatan rakyat dalam partisipasi penyaluran dukungan mauapun tuntutan.

Selanjutnya menurut Darmawan (2015, hlm. 807) *responsibility is a concept pertaining to one’s professional standards, a person’s ability is considered responsible if the perpetrator has a profesional standard or technical competence.*

Memahami arti yang terkandung dari pemamparan diatas bahwa tanggung jawab adalah konsep tentang standar kemampuan seseorang. Seseorang yang memiliki kompetensi maka dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab.

Lalu ditutup oleh Yudi Latif (Gandamana, 2017, hlm. 3) mengatakan:

“Kebebasan individu tidaklah bersifat absolut dalam demokrasi Pancasila, namun harus tetap beriringan dengan yang namanya tanggung jawab sosial. Demokrasi yang terkandung pada Pancasila merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh warga negara Indonesia karena diyakini bersifat ideal dan mampu menjadi harapan yang melandasi segala tindak, perilaku untuk tercapainya cita-cita bangsa. Nilai demokrasi dalam Pancasila juga berfungsi sebagai motivasi dalam menginternalisasikan Pancasila. Dengan nilai tersebut khususnya nilai demokratis yang ditanamkan dalam diri membuat setiap individu termotivasi untuk dapat mengaktualisasikan nilai tersebut secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.”

Dewasa ini tanggung jawab warga negara dalam menjunjung nilai demokrasi yang tercantum dalam pancasila kian memudar, hal itu dibuktikan dengan tingginya sikap apatisme

Ilyas Hafizh Fallah, 2022

AKTUALISASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI ORGANISASI EKSTRA KAMPUS BERBASIS KEISLAMAN DALAM MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY

(STUDI KASUS PADA HMI, PMII, KAMMI, IMM KOMISARIAT UPI)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap keterlibatannya dalam menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin apalagi di masa pandemik covid 19. Contoh nyata yang terlihat adalah total jumlah suara Pemilihan Umum Republik Mahasiswa UPI 2021 hanya mencapai 14.477 suara (diakses pada [Instagram.com/kpu.remaupi](https://www.instagram.com/kpu.remaupi)) sedangkan jumlah Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti adalah 14041 laki-laki dan 26510 perempuan yang berarti total mahasiswa aktifnya adalah 40.551. Dari jumlah yang tercantum diatas hanya menghasilkan 36%, jumlah tersebut sangat terjun drastis karena bahkan tidak mencapai setengahnya. Lalu setelah ditelusuri mahasiswa yang berperan aktif dalam ajang demokrasi kampus tersebut ialah mereka yang mengikuti organisasi ekstra kampus.

Hasil data yang tertera di atas tentunya merupakan hasil yang perlu kita renungkan bersama. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar, sudah sepatutnya memiliki sumber daya yang memadai untuk memberikan pengaruh yang lebih besar. Data tersebut juga menguatkan argumen bahwa partisipasi publik pada sektor sosial dan demokrasi di Indonesia khususnya di tingkat Universitas Pendidikan Indonesia masih harus terus dibangun. Kesadaran, kesediaan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab warga negara untuk melibatkan diri mengatasi krisis sosial-kemanusiaan baik pada tingkat lokal hingga global harus senantiasa ditanamkan. Tren perilaku warga negara hari ini menunjukkan sikap apatisme terhadap permasalahan sosial.

Mahasiswa seharusnya menjadi segelintir orang yang bersimpati pada demokrasi karena jauh dalam dirinya mahasiswa memiliki keinginan juga cita-cita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Darmawan (2022) bahwa kini demokrasi seakan masih bersarang di alam ide. Jika tidak dapat diwujudkan maka demokrasi hanyalah sebuah utopia belaka.

Dalam buku *Global Citizen*, Affandi (2009, hlm 8) Kondisi yang sangat bersebrangan dengan karakteristik warga negara sebagaimana disepakati para pakar yaitu warga negara seharusnya memiliki insting untuk melihat dan mendekati masalah-masalah baik sebagai warga bangsa dan sebagai warga global. Warga negara seharusnya memiliki spirit kerelawanan dan pemberdayaan sosial yang kuat.

Fenomena di atas menjadi suatu pandangan yang negatif terhadap apa yang mendasar berdirinya bangsa Indonesia yang rasa kepeduliannya terhadap tanah air begitu kuat. Apatisme dan individualisme yang menjangkit harus segera tertangani oleh upaya-upaya yang lebih efektif dan strategis. Salah satu yang dapat ditempuh ialah melalui pemanfaatan internet dan media digital. Dalam hal berwarganegara secara signifikan juga dimediasi oleh komunikasi

Ilyas Hafizh Fallah, 2022

AKTUALISASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI ORGANISASI EKSTRA KAMPUS BERBASIS KEISLAMAN DALAM MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY

(STUDI KASUS PADA HMI, PMII, KAMMI, IMM KOMISARIAT UPI)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

digital (*the prerequisites for equitable participation*) (Baddeley, 1997; Jordan, 1999; Moore, 1999) “Beberapa ahli melihat bangkitnya cyberspace telah mengubah perilaku warga negara baik dalam proses berdemokrasi maupun dalam pemenuhan partisipasi kemasyarakatan yang lebih.” Terlebih bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa gotong royong, dimana tidak hanya dalam aspek kehidupan sebagai seorang manusia yang memedulikan sesama, namun sudah selayaknya memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada keputusan politik. Dan sebagai warga negara seyogyanya kita saling bahu membahu guna meningkatkan tanggung jawab serta kewajiban warga negara Indonesia yang sesungguhnya.

Mahasiswa mengemban amanah yang sangatlah besar, pada penerapan hal tersebut yang memang sudah diketahui elemen masyarakat lainnya, itu dikarenakan mahasiswa tidak lepas dari tanggung jawab sosial, moral dan sebagai generasi penerus bangsa, yang diharapkan bisa membawa negaranya ke arah yang lebih baik lagi, jika mahasiswa tidak menerapkan nilai Pancasila khususnya sila ke-4 yaitu sebagai bentuk demokrasi dalam, maka dapat dipastikan bangsa ini akan sering bertemu perpecahan hingga kemerosotan minat politik, karena tidak berjalannya nilai ideologi negara sendiri. Mahasiswa sebagai agen perubahan tentulah harus sadar akan proses, pergejolakan hingga perbedaan dimana ketiga hal tersebut membantu mahasiswa untuk beranjak dewasa dari pengalaman yang membuat mahasiswa akan semakin menjadi mahasiswa yang siap matang, dalam artian sudah bisa memimpin dirinya sendiri, jangankan memimpin sebuah bangsa, tetapi memimpin dirinya sendiri belum berhasil, bagaimana mahasiswa bisa menjadi sebuah agen perubahan jika seperti itu.

Dalam hal ini peran masyarakat begitu diperlukan (Nurmalina dan Syaifullah, 2008, hlm.8) berpendapat bahwa “Warga negara yang menyadari akan tanggung jawab akan berusaha semaksimal mungkin guna menjalankan dan memanfaatkan hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang telah ditetapkan”. Dengan demikian warga negara taat hukum merupakan bentuk pelaksanaan dan penggunaan sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus diterima oleh warga negara Lebih lanjut (Nurmalina dan Syaifullah, 2008, hlm. 48) mengatakan:

“Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga negara, mengetahui batasan-batasan dalam melaksanakan tanggung jawab menjadi urgensi tersendiri, diantaranya: (a) tanggung jawab pribadi, (manusia dan sang pencipta), tanggung jawab terhadap diri sendiri dan (b) tanggung jawab sosial, seperti tanggung jawab kepada sesama manusia juga lingkungan serta terhadap bangsa dan negara.”

Berdasarkan pendapat diatas, tanggung jawab manusia sudah ada meliputi hal terkecil dari dalam dirinya, dari halnya tanggung jawabnya kepada Tuhan, diri sendiri, sampai

masyarakat dimana tempat tinggalnya berada. Menciptakan tatanan yang baik melalui tanggung jawab inilah diperlukannya pengoptimalan tanggung jawab agar istilah warga negara yang baik terlaksana. Dilaksanakan pribadi maupun yang berkaitan kepada orang lain dan lingkungan.

Identifikasi diatas seharusnya segala komponen kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peranan tersendiri dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dimana nilai-nilai demokrasi sejalan lurus rasa peduli mahasiswa terhadap sesama, selayaknya sudah menjadi keseharian dari setiap warga negara. Suatu masyarakat terdapat berbagai komponen di dalamnya. Ada organisasi, paguyuban, forum dan lain sebagainya. Hal ini terbentuk didasari akan adanya kesamaan secara pribadi dan kegiatan dengan harapan untuk berpartisipasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Edwin B. Flippo (Djarmiko, 2002, hlm. 1) mengemukakan pendapatnya tentang organisasi, "organisasi merupakan system keterkaitan antar bagiannya yang ada guna tercapainya targetan bersama". Sasaran ini lah yang menjadi tujuan organisasi dalam memberdayakan sumber daya di dalamnya pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Mooney (dalam Djarmiko, 2002, hlm. 1) organisasi adalah pencapaian tujuan yang didasari dengan saling kolaborasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sementara itu Organisasi Kemahasiswaan yang tertulis pada Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa sebagai bagian dari proses Pendidikan mahasiswa berhak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan dirinya melalui kegiatan intrakurikuler serta ekstrakurikuler yang ada di perguruan tinggi melalui Ormawa. Lalu diperkuat oleh pasal 77 ayat 1 yang menjelaskan bahwa mahasiswa dapat membentuk Ormawa. Ayat 2 pasal 77 menambah penjelasan bahwa Ormawa paling sedikit memiliki fungsi untuk, Mewadahi kegiatan mahasiswa, Mengembangkan kreatifitas, Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa, Mengembangkan tanggung jawab sosial. Setelah itu mengenai struktur keormawaan, tata kelola, manajemen dikembalikan kepada perguruan tinggi, maka sepatutnya tidak heran apabila Ormawa di setiap masing-masing perguruan tinggi bentuknya bermacam-macam.

Organisasi kemahasiswaan menjadi wadah dari bagaimana cara membuat mahasiswa matang, dewasa, menjadi pemimpin bangsa, karena organisasi kemahasiswaan merupakan tempat dimana mahasiswa mencurahkan idealitasnya, pemikiran-pemikirannya, menyalurkan minat dan bakatnya, dan yang paling penting tempat dimana mahasiswa ditempa dan berdinamika lalu berproses, sehingga mahasiswa bisa menjadi semakin matang, dan tentunya

Ilyas Hafizh Fallah, 2022

AKTUALISASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI ORGANISASI EKSTRA KAMPUS BERBASIS KEISLAMAN DALAM MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY

(STUDI KASUS PADA HMI, PMII, KAMMI, IMM KOMISARIAT UPI)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

siap bahkan dipersiapkan menjadi pemimpin bangsa, karena memimpin bangsa tidaklah semudah membalikan telapak tangan ada banyak sekali permasalahan-permasalahan bangsa yang harus diselesaikan secara tepat, cepat, dan cermat, untuk itulah mahasiswa haruslah belajar sifat kepemimpinan sebaik mungkin untuk mengatasi hal tersebut.

Organisasi kemahasiswaan atau disingkat (Ormawa) adalah suatu kelompok yang menjadi kesatuan utuh dan dikenal sebagai wadah untuk menambah laju kembang diri mahasiswa sehingga minat, bakat dan keilmuan mahasiswa dapat tersalurkan sesuai dengan arah perofesi mahasiswa tersebut.

Dari banyaknya organisasi mahasiwa yang ada, organisasi ekstra kampus memiliki eksistensi dan peranan yang khusus pada pergerakan kaum intelektual di Indonesia sejak 1998 lalu pada saat digulingkannya orde baru. Organisasi ekstra berbasis keislaman juga memiliki sumbangsih yang besar terhadap negara Indonesia, hal tersebut tidak luput dari keberhasilannya dalam mencetak kader-kadernya menjadi manusia yang diakui di negeri ini lewat didikan wawasan kebangsaan yang matang juga ideologi yang terbentang.

Organisasi seperti, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ialah organisasi ekstra kampus yang mempunyai tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berada di taraf adil serta makmur. Masing-masing organisasi kemahasiswaan berkeyakinan dengan dihadapkannya organisasi kemahasiswaan ditengah tatanan masyarakat seperti ini, maka warga negara Indonesia masih dapat diselamatkan dari gemerlap kebodohan, belenggu kemiskinan, mirisnya kemelaratan, jauhnya ketertinggalan dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Serta yang menarik dari keempat ormawa tersebut memiliki basis yang sama yaitu basis keislaman. Keempat ormawa tersebut dinilai sebagai organisasi mahasiswa yang dapat mencetak anggotanya menjadi insan akademis bernafaskan islam. Organisasi ini pun tetap menjunjung tinggi ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan diyakini untuk tetap dipertahankan bukan sebagai pertentangan, maka dari itu islam dan Pancasila tetap perlu disandingkan demi tercapainya tujuan masing-masing ormawa dan terciptanya perilaku masyarakat yang di ridhioi Allah SWT.

Berbicara mengenai sebuah Demokrasi tidaklah bisa lepas dari perpolitikan di dalam Negara tersebut, bagaimana tidak demokrasi pada dasarnya merupakan asal kata dari demos dan kratos, yang sejatinya merupakan ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan dengan rakyat, keadaan Negara secara dinamis, untuk itulah dirasa perlu bagi mahasiswa setidaknya

Ilyas Hafizh Fallah, 2022

AKTUALISASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI ORGANISASI EKSTRA KAMPUS BERBASIS KEISLAMAN DALAM MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY (STUDI KASUS PADA HMI, PMII, KAMMI, IMM KOMISARIAT UPI)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengerti akan konsep demokrasi itu sendiri yang bearada dalam ilmu politik, hal tersebut bisa diajarkan lewat pendidikan politik langsung di dalam organisasi kemahasiswaan, lewat kegiatan dan keberdinamikaanya. Pendidikan politik ini pada organisasi kemahasiswaan ini memiliki orientasi, mahasiswa dapat setidaknya melek dan mengerti akan konsep serta perilaku politik, cara bermusyawarah, dan terlebih lagi mengamalkan kewajiban serta kewajiban sebagai seorang warga Negara yang baik, dan tentunya mengamalkan pancasila sebagai dasar Negara, yang mana hal tersebut dapat dipelajari mahasiswa dalam menjalankan roda organisasi kemahasiswaannya.

Tujuannya dari HMI, PMII, KAMMI, IMM itu sendiri adalah untuk membentuk seorang mahasiswa yang taqwa, beriman, bertaqwa dan Pancasilais sejati. Dalam menerapkan tujuannya, ada pula tujuan lainnya ialah pemahaman akan realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kemajemukannya, sehingga organisasi ekstra berbasis keislaman akan bekerja untuk kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, terdapat empat kegiatan pokok HMI, PMII, IMM, KAMMI yang meliputi: ruang aktualisasi, pola kaderisasi adaptif, integrasi dengan masyarakat, dan pola piker inovatif. Secara umum keempat hal tersebut dimanifestasikan dalam aksi-aksi yang telah dilakukan HMI, PMII, IMM, KAMMI dalam menjalankan demokrasi kampus, HMI, PMII, IMM, KAMMI selalu mengirimkan anggotanya dalam kegiatan ajang demokrasi kampus terutama dalam PEMILU REMA terlibat secara langsung ke lapangan dengan ilmu-ilmu yang dibekali selama menjadi anggota HMI, PMII, IMM, KAMMI. HMI, PMII, IMM, KAMMI merupakan organisasi ekstra kampus yang berbasis keislaman namun tetap konsisten dalam aksi-aksi demokrasi Pancasila. Terbukti dari awal berdiri sampai saat ini, HMI, PMII, IMM, KAMMI masih terus aktif dan masiv dalam kegiatan-kegiatan demokrasi Pancasila. Melihat data awal yang dikumpulkan oleh peneliti ditemukan lah programprogram HMI, PMII, IMM, KAMMI yang bertemakan demokrasi Pancasila.

Dengan rendahnya persenan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia meramaikan ajang demokrasi PEMILU REMA, maka dapat dikatakan sudah saatnya, organisasi mahasiswa memang haruslah berorientasi mencetak mahasiswa yang bisa memimpin bangsa melalui pendidikan politik, karena sejatinya pendidikan politik itu penting bagi mahasiswa, yang merupakan generasi harapan penerus bangsa, karena dalam mengetahui hak-haknya dalam berpartisipasi, serta berdemokrasi seperti mengutarakan pendapat, bergotong-royong, bermusyawarah, dan mencetak mahasiswa-mahasiswa yang secara fisik dan mental siap

Ilyas Hafizh Fallah, 2022

AKTUALISASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI ORGANISASI EKSTRA KAMPUS BERBASIS KEISLAMAN DALAM MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY (STUDI KASUS PADA HMI, PMII, KAMMI, IMM KOMISARIAT UPI)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memimpin bangsa, oleh karena itulah aktualisasi nilai demokrasi dari ini dirasa tepat ditelusuri dan diteliti di dalam organisasi ekstra kampus berbasis keislaman (HMI, PMII, KAMMI, IMM). Sehingga pada akhirnya menciptakan mahasiswa yang pandai berdemokrasi dan memiliki sifat kepemimpinan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah disusun peneliti, peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan masalah guna riset ini memiliki kefokusannya yang mutlak berdasarkan masalah, dengan demikian masalah pokok tersebut peneliti menuliskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aktualisasi nilai demokrasi Pancasila melalui organisasi ekstra kampus berbasis keislaman dalam membangun civic responsibility?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi HMI, PMII, KAMMI, IMM dalam pelaksanaan aktualisasi nilai demokrasi Pancasila dalam membentuk civic responsibility.
3. Bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh organisasi ekstra kampus HMI, PMII, KAMMI, IMM guna menghadapi hambatan dalam pelaksanaan aktualisasi nilai demokrasi Pancasila dalam membentuk civic responsibility?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mencari tahu bagaimana aktualisasi nilai – nilai Demokrasi Melalui Organisasi Ekstra Kampus Dalam Membangun civic responsibility.

1.3.2. Tujuan Khusus:

1. Dapat diketahui tahapan aktualisasi nilai – nilai demokrasi dalam Pancasila yang dilaksanakan oleh Organisasi ekstra Kampus HMI, PMII, KAMMI, IMM dalam mengkader anggotanya.
2. Mengetahui hasil pelaksanaan keempat organisasi ekstra kampus berbasis keislaman tersebut dalam mengaktualisasikan nilai -nilai demokrasi dalam meningkatkan civic responsibility.
3. Mengetahui hambatan yang dirasakan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Organisasi ekstra Kampus HMI, PMII, KAMMI, IMM dalam mengaktualisasikan nilai demokrasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada hakikatnya dapat didapatkan setelah penelitian dilaksanakan, maka dari itu peneliti memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

Ilyas Hafizh Fallah, 2022

AKTUALISASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI ORGANISASI EKSTRA KAMPUS BERBASIS KEISLAMAN DALAM MEMBANGUN CIVIC RESPONSIBILITY

(STUDI KASUS PADA HMI, PMII, KAMMI, IMM KOMISARIAT UPI)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Dapat diketahui bentuk aktualisasi nilai – nilai demokrasi yang dilaksanakan oleh HMI, PMII, KAMMI, IMM dalam meningkatkan civic responsibility.
2. Dapat diketahui hasil pelaksanaan aktualisasi nilai – nilai demokrasi yang dilaksanakan oleh HMI, PMII, KAMMI, IMM dalam meningkatkan civic responsibility.
3. Dapat diketahui hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengaktualisasi nilai – nilai demokrasi yang dilaksanakan oleh HMI, PMII, KAMMI, IMM dalam meningkatkan civic responsibility.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. **BAB 1 Pendahuluan**, meliputi latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.
2. **BAB II Kajian Pustaka**, memuat mengenai berbagai teori dan konsep yang dirasa relevan dengan penelitian.
3. **Bab III Metode Penelitian**, meliputi metode penelitian yang akan dilakukan juga berbagai komponen yang menunjang berlangsungnya penelitian, seperti pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, Teknik pengumpulan data hingga analisis data.
4. **Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan**, yang menjabarkan mengenai gambaran umum penelitian dan analisis hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung
5. **Bab V Kesimpulan dan Saran**, memuat mengenai berbagai penafsiran dan pemakaian penelitian terhadap hasil penelitian. Kesimpulan berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah sedang saran merupakan rekomendasi yang ditunjukkan kepada berbagai pihak terkait.